

Judul : Presiden AIPA Membuka Pertemuan WAIPA
Tanggal : Selasa, 18 September 2012
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

Presiden AIPA Membuka Pertemuan WAIPA

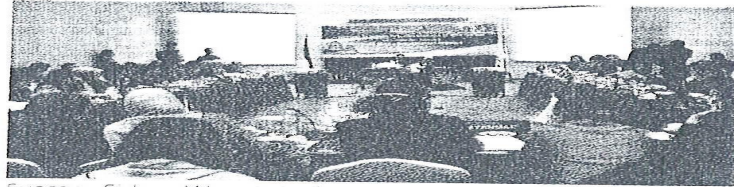
PRESIDEN AIPA sekaligus Ketua DPR RI Marzuki Alie membuka pertemuan Woman Parliamentarians of AIPA (WAIPA) yang dihadiri 291 delegasi parlemen Asean dari 10 negara Asean dan 10 negara *observer* seperti Australia, Belarus, Canada, Cina, serta 34 delegasi parlemen perempuan di Sengigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (17/9).

Dalam pertemuan WAIPA membahas tiga draft resolusi yaitu, draft resolusi dukungan anggota Asean dalam memperkuat kerja sama dalam menerapkan *roadmap Millenium Development Goals* (MDGs) untuk memperkecil *gaps* diantara anggota Asean. Kemudian draft resolusi mengenai peran parlemen perempuan dalam memperkuat kebijakan yang pro perempuan di berbagai sektor, seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Berikutnya yaitu draft resolusi peningkatan pembangunan kapasitas dan pelatihan khusus bagi perempuan di pedesaan. Pada pertemuan tersebut disepakati Ketua Sidang WAIPA dari Indonesia, Nurhayati Ali Assegaf dan *rapporteour* Evita Nursanty.

Saat membacakan Pidato di sidang WAIPA, Marzuki Alie mengungkapkan, keberadaan perempuan menjadi semakin vital karena itu melalui pertemuan ini diharapkan dapat mendorong dan mengevaluasi rencana program perlindungan bagi kaum perempuan, dan diharapkan dapat menjawab persoalan perempuan di kawasan Asia Tenggara. "Terdapat 1,3 miliar jiwa berada dalam kemiskinan absolut dan 7% itu termasuk kaum perempuan," ujarnya.

Marzuki menilai, persoalan perempuan diantaranya masih rendahnya keterlibatan perempuan di bidang politik, pendidikan, dan kemampuan baca tulis perempuan yang masih rendah dibandingkan laki-laki. "Kita mengharapkan bisa lebih produktif dan saling tukar pendapat apa saja yang menjadi hambatan serta cerita



Suasana Sidang Woman Parliamentarians of AIPA (WAIPA) di Lombok, Nusatenggara Barat, Indonesia yang dihadiri 291 delegasi parlemen Asean dari 10 negara Asean.

suksesnya sehingga dapat menjadi *lesson learn* untuk semua anggota," imbuhnya.

Dia mengatakan, dirinya memahami bahwa persoalan perempuan di Asia Tenggara sangat kompleks dengan maknanya ketidakkadilan terhadap perempuan karena itu perlu pendekatan komprehensif untuk mengurai persoalan tersebut. "Jadi tidak hanya *parlemen action* perlu dukungan lainnya seperti *gender mainstreaming paradigm*. Isu perempuan harus mengakar didalam kehidupan berbangsa dan negara, karena itu terkait perempuan tidak akan sukses bila budaya suatu wilayah tidak mendukung arus utama gender," katanya.

Menurutnya, kita harus berusaha menciptakan produk hukum dan lokal yang memiliki arus gender atau perempuan. "Kita mengharapakan pertemuan ini dapat menghasilkan keputusan yang strategis dan bermanfaat dalam wujud pemberdayaan permasalahan kaum perempuan di berbagai bidang," tambahnya.

Sedangkan, Ketua Sidang WAIPA Nurhayati Ali Assegaf usai Sidang WAIPA mengungkapkan, keinginannya mendorong kemajuan anggota-anggotanya untuk lebih berperan di parlemen negara masing-masing dan tidak sekadar memenuhi target atau ketentuan. "Kita tidak ingin perempuan hanya memenuhi kuota," katanya.

Karena itu, Nurhayati yang juga Wakil Ketua BKSAP DPP

RI, WAIPA mendorong agar perempuan semakin berperan di parlemen negara-negara masing-masing. "Jadi, tidak sekadar memenuhi kuota tetapi juga menduduki posisi penting dan pengambil keputusan," jelas Nurhayati yang juga Ketua Faksi Partai Demokrat (FPD).

Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara umumnya menghadapi kendala pencapaian target MDGs khususnya menyangkut kesehatan perempuan, menekan ibu melahirkan dan menurunkan angka kematian bayi. "Kita bahas tiga draft resolusi. Untuk resolusi MDGs, hampir di semua negara ASEAN yang belum tercapai terkait kesehatan perempuan khususnya menurunkan angka ibu melahirkan dan menurunkan angka kematian bayi," ungkapnya.

Mengenai angka kematian ibu melahirkan, Nurhayati mengatakan, sebenarnya juga harus dilihat jumlah penduduk suatu negara. Kalau jumlah penduduknya besar atau banyak, maka angka kematian ibu dan bayi terlihat besar. "Tetapi ada satu level dalam program MDGs yang harus dicapai. Misalnya, harus dicapai 101 per 1.000 kelahiran. Sementara Indonesia masih menggunakan data BPS tahun 2007 sehingga masih terlihat tinggi. Karena itu, saya berharap Indonesia segera merevisi data kemudian menggunakan data terbaru, sehingga kita tahu sampai dimana pencapaian MDGs," katanya.